

**POKOK-POKOK PIKIRAN PENTING TENTANG PILKADA DAN OTONOMI
DAERAH: TEMU PENELITI LIPI DAN PERS
JAKARTA, 26 MEI 2005**

Dr. R. Siti Zuhro, M.A.

1. Pilkada adalah hal yang pertama kali dilaksanakan dalam sejarah politik Indonesia. Berbeda dengan pemilu presiden/wakil presiden dan wakil rakyat, pilkada secara langsung yang akan dilaksanakan Juni 2005 melibatkan sekitar 226 provinsi dan kabupaten/kota: 11 untuk pemilihan gubernur, 215 untuk pemilihan bupati dan wali kota. Banyaknya pilkada yang diselenggarakan dalam tahun 2005 ini menunjukkan bahwa pilkada akan dilaksanakan di sebagian besar daerah di Indonesia.
2. Pilkada akan memberikan makna signifikan bagi dinamika politik lokal karena pilkada merupakan salah satu unsur penting otonomi daerah dan ini merupakan terobosan politik yang "fundamental" bagi perkembangan politik lokal dan demokratisasi lokal. Demokratisasi lokal yang berlangsung seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak 2001 makin mendapatkan peluang dengan adanya pilkada. Hal ini tentunya merupakan pengalaman yang penting karena berlangsung pada level yang berbeda. Peran masyarakat dalam memilih langsung pimpinan daerah menunjukkan kemajuan pesat bila saja pilkada ini nanti sungguh-sungguh berlangsung secara demokratis dan tidak diwarnai oleh konflik dan kekerasan.
3. Namun demikian, keputusan pemilihan kepala daerah langsung ini tidak menjanjikan terwujudnya pilkada yang tanpa masalah. Perkembangan terakhir mengenai pilkada menunjukkan bahwa tidak hanya daerah konflik/rawan konflik bakal menuai konflik dalam pelaksanaan pilkada, di daerah yang tadinya tenang pun ternyata bisa memunculkan konflik ketika proses pilkada mulai dilaksanakan. Sebagai contoh pilkada di Bali.
4. Perlu dicermati keterlibatan birokrasi dan penggunaan *money politics* dalam pilkada. Hal ini penting agar calon yang muncul sungguh-sungguh mencerminkan dukungan sebagian besar masyarakat. Bukan sebaliknya, hanya mewakili dukungan orang yang memiliki modal atau orang yang didukung pemilik modal kuat saja.
5. Bagaimana menciptakan pilkada yang tak hanya didominasi kaum adam saja. Dengan proporsi jumlah perempuan di daerah yang relatif besar, maka seyogianya perempuan juga memiliki andil dalam kompetisi pilkada langsung. Realitanya perempuan belum hadir secara signifikan dalam pilkada 2005 meskipun ada satu dua calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang mulai muncul.
6. Idealnya, pilkada menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemilu. Karena pilkada diharapkan menjadi sarana pembelajaran politik masyarakat lokal, dan untuk menjaring pimpinan daerah yang kompeten, berintegritas, dan mewakili aspirasi daerah. Sama dengan pemilu, pilkada juga mengikuti asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan

adil yang dilaksanakan setiap lima tahun (pasal 22E UUD 1945). Gagasan untuk memisahkan pilkada dari pemilu adalah ide yang rancu, dan tak memiliki argumen yang kuat. Ini merupakan *blunder* asumsi di tengah perkembangan politik lokal. Karena baik pemilu maupun pilkada, keduanya bermuara pada gagasan sentral: demokratisasi. Dan pemilu menjadi salah satu pilar demokrasi.

7. Keterkaitan pilkada dan otonomi daerah akan semakin erat bila pilkada berlangsung secara demokratis dan damai. Artinya bahwa pelaksanaan pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang dikendaki rakyat. Legitimasi dan kredibilitas awal yang dimiliki seorang pimpinan daerah akan bisa menciptakan tanggung jawab yang tak kecil baginya. Hal ini sangat diperlukan sebagai bekal untuk memimpin daerah. Berkaitan dengan otonomi daerah fenomena seperti ini akan memberikan makna otonomi daerah yang sesungguhnya. Karena tanpa adanya pemilihan kepala daerah secara langsung, otonomi daerah kurang bermakna signifikan bagi daerah.

8. Masalahnya bagaimana kepala daerah yang terpilih itu bisa melaksanakan visi, misi, dan programnya. Disinilah sebenarnya terkandung makna hakiki dari otonomi daerah: pemimpin yang dikehendaki rakyat dan sekaligus diharapkan bisa mensejahterakan rakyat dan memberdayakan pemerintahan daerahnya.

9. Dengan beberapa harapan positif sebagaimana tersebut dalam poin 7 dan 8, diharapkan akan bisa mengimbangi prospek tak cerah pilkada ke depan sebagaimana tersebut dalam poin 3, 4, 5, dan 6. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana kita menyikapi atau mengantisipasi prospek yang tak cerah (*gloomy*) pelaksanaan pilkada langsung. Hal ini penting, untuk menghindari agar pilkada tak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan untuk meraih jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Dengan kata lain, perlu upaya konkret meletakkan pilkada dalam konteks pemberdayaan politik masyarakat daerah atau otonomi daerah, agar dampaknya terhadap demokratisasi lokal juga ikut meningkat. Nilai-nilai pilkada langsung seperti inilah yang seharusnya membedakannya dari pilkada yang dilaksanakan melalui DPRD.